

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH DIDESA  
PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Indah Rahayu Hanian**

**NIM : 401190265**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**IAIN  
2023  
PONOROGO**

## ABSTRAK

Hanian, Rahayu Indah. Analisis Efektifitas Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong . *Skrisi*.2023. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Aji Damanuri.

**Kata Kunci:** Efektifitas, Program Bantuan Sosial PKH, Tujuan PKH, Hambatan Program PKH

Efektifitas program keluarga harapan pada Desa Pandak secara keseluruhan berdasarkan rata-rata indikator 4T adalah tidak efektif dimana 3T dari 4T indikator yang ditetapkan tidak terpenuhi, 3T indikator yang tidak terpenuhi itu adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat waktu dan 1T indikator yang telah terpenuhi yaitu tepat administrasi.

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Pandak, dapat dilihat dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Maka penulis berkesimpulan bahwa efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Pandak sudah dapat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat namun demikian PKH ini belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dilihat dari indikator perubahan nyata yang dialami masyarakat.

Hambatan yang dialami program keluarga harapan di Desa Pandak yaitu pada indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata sebagai berikut dimana belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya penerima bantuan yang mempergunakan dana yang diterimanya diluar ketentuan yang dipersyaratkan misalnya dana yang diterimanya dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan keperluan dapur lainnya karena alasan tertentu.

P E R S U T U J U A N U J I A N S K R I P S I



KEMENTERIAN AGAMAM REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi dengan atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Indah Rahayu Hanian	401190265	Ekonomi Syariah	Analisis Efektifitas Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya telah disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui

Menyetujui



Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M. E. I

NIP. 197801122006041002

Aji Damanuri, M.E.I.  
 NIP. 197506022002121003

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial PKH di Desa  
 Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo  
 Nama : Indah Rahayu Hanian  
 NIM : 401190265  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas  
 Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu  
 syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :  
 Iza Hanifuddin, Ph.D  
 NIP. 196906241998031002  
 Penguji I :  
 Muchtim Humaidi, M.IRKH.  
 NIP. 2027068103  
 Penguji II :  
 Dr. Aji Damanuri, M.E.I  
 NIP. 197506022002121003

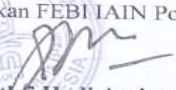
(  )

(  )

(  )

Ponorogo, 23 Mei 2023

Mengesahkan,  
 Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
 NIP. 197207142000031005

  
 P O N O R O G O

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Rahayu Hanian  
NIM : 401190265  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahawa naskah skripsi/tesis telah diperiksadan disahkan oleh dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id).

Apabila isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023



Indah Rahayu Hanian  
401190265

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN****LEMBAR KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indah Rahayu Hanian

Nim : 401190265

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH DI  
DESA PANDAK KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang harus dilakukan rujukan pada sumbernya.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Pembuat Pertanyaan

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAI TEMPEL' and the number '72AKX264927986'. To the left of the stamp, there is a vertical stamp with the text '0101190265' and 'INDAH RAHAYU HANIAN'.

Indah Rahayu Hanian

401190265

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>1</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TULISAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
A. Latar Belakang masalah .....	9
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Manfaat Penelitian .....	15
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	16
F. Metode Penelitian .....	24
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	25
b. Penelitian Lapangan .....	26
c. Data dan Sumber Data .....	26
d. Teknik Pengumpulan Data .....	27
e. Teknik Pengolahan Data .....	29
f. Teknik Analisis Data .....	30
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II PENGERTIAN EFEKTIVITAS DAN PROGRAM BANTUAN</b> <b>SOSIAL PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN)</b> .....	<b>34</b>
A. Pengertian Efektivitas .....	34
B. Pengertian PKH .....	41
C. Tujuan utama dari PKH .....	44
<b>BAB III EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN , KUALITAS SERTA</b> <b>KUANTITAS DAN DAMPAK PENGHAMBAT PROGRAM BANTUAN</b> <b>SOSIAL PKH</b> .....	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58

1) Letak Geografis Desa Pandak .....	58
2) Kondisi Sosial Desa Pandak .....	58
3) Keadaan Ekonomi .....	59
4) Perumahan .....	60
5) Pendidikan .....	60
6) Kondisi Penduduk .....	61
B. Efektifitas Pencapaian Tujuan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak ....	62
C. Kualitas dan Kuantitas Program PKH Bagi Masyarakat di Desa Pandak .....	79
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS TUJUAN SASARAN, KUALITAS SERTA KUANTITAS DAN DAMPAK PENGHAMBAT PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH .....</b>	<b>84</b>
A. Analisis pencapaian tujuan bantuan oleh peserta penerima program keluarga harapan (PKH) di Desa Pandak .....	84
B. Analisis Kualitas dan Kuantitas program bantuan sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo .....	85
1. Tepat Sasaran .....	85
2. Tepat waktu .....	86
3. Tepat penggunaan .....	86
4. Tepat Administrasi .....	90
C. Analisis Hambatan Pada Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>



## B A B 1

### P E N D A H U L U A N

#### A . Latar Belakang masalah

Di Negara berkembang tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sangatlah tinggi terkadang pemerintahpun cukup kerepotan dalam menanggulangnya jumlah angka kelahiran yang begitu besar dan jumlah angkatan kerja yang begitu besar mengakibatkan pemicu utama terjadinya kemiskinan dan pengangguran, oleh sebab itu dibutuhkan adanya terobosan terbaru untuk memperluas lapangan pekerjaan dan penekanan angka kelahiran dengan cara mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) yang selama ini telah digalakan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Dimasa pandemi Corona yang melanda Negara diberbagai penjuru dunia tentunya ini memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian Negara, hal ini perlu juga adanya pembenahan perekonomian secara bertahap, dengan cara memberikan bantuan misalnya, seperti subsidi gaji untuk para kaum buruh dan pekerja lainnya, yang tercover di lingkup sebagai ASN dan PNS, dan tenaga Honorer lainnya, lalu mengoptimalkan program bantuan. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang disebabkan jumlah peningkatan angka kelahiran dan angka kelahiran dan angka pengangguran. Terkadang apalah daya manusia memiliki takdir dan nasib yang tak sama ini semua sudah kehendak sang pencipta, yaitu tuhan semesta

---

<sup>1</sup> "Aravik, H. 2016. *Ekonomi Islam : Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam* dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi. Malang: Empat Dua.,” Aug 3, 2020

alam. Garis kemiskinan saat ini telah mencapai tingkat yang tinggi di susul dengan adanya wabah yang melanda negeri ini.<sup>2</sup>

Kondisi politik dan ekonomi dewasa ini telah mendorong para pegawai memberikan perhatiannya terhadap pengembangan kemampuan kerjanya. Dengan adanya inflasi ekonomi, gelombang resesi dan pengurangan dalam alokasi pegawai, nilai efisiensi administrasi telah memberikan pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh nilai efisiensi jika dibandingkan nilai-nilai lainnya seperti keadilan sosial, responsivitas politik maka efektifitas pegawai telah mendorong pemahaman yang sangat kompleks, dan bahkan pada motivasi pegawai juga. Produktifitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang akan di peroleh dalam produksi.

Dalam hal ini tidak terlepas dengan efisiensi dan efektifitas. Bicara tentang produktivitas tidak dapat terlepas dari dua hal tersebut. Efisiensi diukur dengan rasio output dan input. Atau dengan kata lain mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja, seperti misalnya jumlah makan siang yang dilayani dalam kafetaria sekolah atau jumlah penangkapan yang dilakukan oleh petugas polisi dan identifikasi jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu.

Skala produktivitas menjadi tuntutan utama seiring dengan pertambahan penduduk, sehingga semakin besar juga kapasitas layanan

---

<sup>2</sup> “Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang,” 2014-04-20,

yang harus diberikan. Organisasi publik harus menanggung resiko luasnya layanan, variasi dan segmentasi layanan publik. Dari sisi lain ukuran organisasi publik selama ini. Menjadi masalah terkait dengan pemenuhan efisiensi struktur yang harus rightsizing. Akhirnya teknologi sebagai strategi pamungkas untuk meningkatkan produktivitas layanan ini. Dengan menggunakan alat teknologi, maka pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga produktivitas organisasi publik juga meningkat.

Masalah ekonomi timbul dari adanya keterbatasan sumber ekonomi. Sumber daya tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sehingga, jika dapat di sederhanakan, maka persoalan ekonomi berawal dari sumber daya yang terbatas (scarcity) untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (need and want) yang sifatnya tidak terbatas (unlimited). Dan krisis ekonomi dan kenaikan bahan bakar (BBM) membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin terpuruk. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan program keluarga harapan, yaitu masyarakat yang berpendapatan rendah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan namun hal ini belum mencapai tingkat taraf signifikan. Berdasarkan data yang di langsir dari BPS saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia telah menembus angka, 24,79 juta orang. Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan).<sup>3</sup>

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Masalah utama dalam kehidupan sosial masyarakat adalah cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena

---

<sup>3</sup> "Dianti Ramadhan, 2016. Skripsi : Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerajinan Tangan Khas Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus). IAIN Raden Intan Lampung," 2017,

<sup>4</sup> "Harry Hikmat, 2018. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Jakarta : Perlindungan dan Jaminan Sosial.,"

perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah final yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja.

Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga setiap individu dapat peluang mewujudkan masalah bagi kehidupannya. Pada akhirnya apabila masalah dapat dicapai, maka kehidupan manusia akan bahagia dunia akhirat. Distribusi merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan pindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain, mekanisme yang digunakan dalam distribusi adalah dengan cara pertukaran (mubadalah) antara produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Dalam syariat Islam bentuk distribusi dikemukakan dalam akad. Dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Berbagai program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa untuk memperkuat ketahanan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dalam memperoleh makanan pokok yaitu beras maka pemerintah mengadakan program Keluarga Harapan untuk Rumah Tangga Miskin. PKH merupakan program untuk menolong masyarakat yang rawan pangan,

agar mereka mendapatkan beras dan telur untuk kebutuhan rumah tangganya. Sasaran atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Miskin (RSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan yang utama adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin.

Di Desa Pandak adalah desa yang berada di salah satu desa di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Mata pencarian di desa Pandak rata-rata petani yang hanya bergantung pada perekonomian dengan hasil tani yang tidak menentu. Karena rata-rata masyarakat Desa Pandak hanya berprofesi sebagai petani membuat perekonomian di Desa Pandak tersebut menengah ke bawah, sehingga layak untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dengan mewawancarai (Sirnan, S.E) selaku Kepala Desa Pandak Kecamatan Balong, timbul persoalan di tengah masyarakat karena tidak akuratnya data Rumah Tangga Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandak. Kondisi tersebut menimbulkan 3 fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, pertama ada Rumah Tangga Miskin yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan, kedua tidak tepat sasaran dalam pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut, ketiga terhambatnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Pandak Kecamatan

Balong Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pencapaian Tujuan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Kualitas dan Kuantitas dalam Pendistribusian Pada Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana Hambatan pada Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

#### C. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan tentang Bantuan sosial PKH dan BLT-DD di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang efektivitas pengelolaan program perlindungan sosial PKH terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

##### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai Bantuan PKH. Penelitian ini diharapkan dapat

memperluas pengetahuan dan menambah wawasan permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar.

- 2) Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas sasaran program bantuan sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas dan kuantitas penggunaan program bantuan sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis factor penghambat dan pendukung dalam program bantuan sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

#### E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, Khoirul Nts dengan judul “Penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Tinggi Kota”.

Penelitian Khairul menggunakan analisis kualitatif pendekatan deskriptif. Hasilnya efektifitas program keluarga harapan sudah menjalankan kewajiban dengan baik dan cukup efektif meningkatkan taraf hidup, tetapi masyarakat masih kurang memahami dalam memaknai pentingnya arti



pendidikan dan kesehatan. Selain itu belum semua masyarakat miskin merasakan program keluarga harapan di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Tinggi Kota. Persamaan Sama-sama membahas tentang efektivitas PKH, sedangkan perbedaannya penelitian Khairul menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis kuantitatif, serta tempat penelitian dilakukan.<sup>5</sup>

Kedua, Nurdiana dalam skripsinya tentang "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa" didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang Implementasi dan hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Mambi.

Tujuan dari skripsi tersebut Untuk mengetahui implementasi pelayanan dan hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Persamaan dan perbedaan penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang membedakan dari skripsi tersebut adalah dari isinya dimana penulis lebih memperdalam keefektifan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>6</sup>

Ketiga, Eny Kusumawatidalam skripsinya yang berjudul "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan

---

<sup>5</sup> "Khoirul Nts 'Penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Tinggi Kota'.,".

<sup>6</sup> "Nurdiana 'Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa'. (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2017).", <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13001>.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati), skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi PKH berdasarkan indikator tepat sasaran dimana PKH di Desa Soko dianggap cukup mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa Soko, dan penelitian dari Eny Kusumawati berkaitan dengan peneliti adapun tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui implementasi PKH di Desa Soko menurut perspektif ekonomi Islam, perbedaan dan persamaan peneliti dan penulis skripsi tersebut adalah sama-sama membahas PKH dan menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya adalah fokus kajiannya berbeda hukum keluarga dan ekonomi Islam.<sup>7</sup>

Keempat, Ridho Diana dengan judul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam” dengan kesimpulan Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada peserta PKH Desa Kota Jawa).<sup>8</sup>

Kelima, Desi Pratiwi dengan judul skripsi “Efektivitas Program

---

<sup>7</sup>“Kusumawati, Eny (2019) Analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perspektif ekonomi Islam : studi kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.,” 20 Desember 2022 06:46,

<sup>8</sup>“Diana,Ridho.Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Eekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khlau),”

Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam” dengan kesimpulan Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I yang dimulai sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan belum efektif, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa sebagian penerima manfaat PKH sudah tergolong mampu secara ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan tidak efektif dan efektif melalui variabel pengukuran efektivitas dan indikator efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam menentukan penerima PKH di Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur.<sup>9</sup>

Keenam, Claudio usman dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)” kesimpulan Mengacu pada hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu Bahwa apabila program keluarga harapan dapat berjalan dengan efektif maka dapat sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan yang ada. Ini merupakan

---

<sup>9</sup> Drs H M Saleh, “Jurusan: Ekonomi Syariah Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

salah satu faktor penting yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada saat ini.

Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat dari program yang masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan masih belum berjalan sebagaimana mestinya program ini. Dan efektivitas program keluarga harapan berpengaruh secara signifikan dalam menanggulangi kemiskinan, berdasarkan hasil penelitian yang diteliti dilapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menguji hipotesis yaitu “efektivitas program keluarga harapan berpengaruh positif dan signifikan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.”<sup>10</sup>

Ketuju, Nur Aida dengan judul jurnal “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang” dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pemahaman Program dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya.

---

<sup>10</sup>“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo).”.

- b) Tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang belum berjalan efektif.
- c) Tepat waktu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang belum berjalan efektif.
- d) Tercapainya tujuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten subang belum berjalan efektif, karena masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya.
- e) Perubahan nyata dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kabupaten Subang bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan.

Kedelapan, Sri Sutjiatmi, Farida Umaroh dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal” dengan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi. Namun demikian

ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan PKH seperti:

- a) Penetapan rumah tangga sasaran Sasaran program keluarga harapan adalah masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah, balita dan ibu hamil.
- b) Proses sosialisasi Proses sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pertemuan awal dan validasi tetapi di Desa Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan).
- c) Penyaluran bantuan Bantuan langsung yang diperoleh peserta PKH dipergunakan untuk keperluan sekolah anak dan pemenuhan kebutuhan.

Sedangkan dalam komponen kesejahteraan sosial di Desa Kupu terdapat satu peserta yang memperoleh bantuan pada komponen kesejahteraan sosial berdasarkan informasi dari pendamping bantuan tersebut belum tersalurkan padahal komponen tersebut sudah berlangsung dari tahun 2016 serta terbatasnya fasilitas kesehatan yang belum merata seperti kurangnya sarana posyandu lansia.<sup>11</sup>

Kesembilan, Nurkhairiyah Nahdatullah dengan judul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Simpang IV Sipin)” dengan kesimpulan Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis

---

<sup>11</sup> Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal,” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 2, no. 2 (23 April 2019).

yang telah dilakukan, maka penelitian mengenai Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kelurahan Sipang Iv Sipin) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.
- b) Adapun hambatan dalam efektifitas program keluarga harapan Di Kelurahan Sim pang IV Sipin adalah kurang tepatsasaran nya penerima PKH yang disebabkan penentuan penerima PKH, bukan dari pemerintah daerah melainkan dari pemerintah pusat. Sehingga terjainya tidak kesesuaian data.<sup>12</sup>

Kesepuluh, Felinda W ulandari, Yam ardi, Titin Rohayatin dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat” dengan kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat belum efektif dikarenakan waktu pemberian dana PKH yang tidak konsisten

---

<sup>12</sup> Nurkhairiyah Nahdatullah, “Pembimbing I: Drs. Arsa, M.HI Pembimbing II: KHAIRIYANI, SE.,M .S.A K,” 2020

terhadap waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

#### F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam kancah sebenarnya. Penelitian field research dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada lokasi di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan demografi kependudukan yang berhak menerima bantuan PKH.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>15</sup>

Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan fakta, gambaran dan informasi mengenai efektivitas

<sup>13</sup> Felinda Wulandari, Yamardi Yamardi, dan Titin Rohayatin, "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalaang Kabupaten Bandung, 2020

RAT," *Jurnal Caraka Prabhu* 4, no. 1 (1 Juni 2020): 31–46, <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.206>.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 43

<sup>15</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019)*.



pengelolaan program Bantuan PKH terhadap perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Data yang dikumpulkan adalah berupa penjelasan melalui kalimat atau kata-kata, maupun berupa gambar bukan penjelasan dengan menggunakan statistik angka.

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan serta menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta tentang efektivitas pengelolaan program Bantuan PKH terhadap perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di desa Sukarame. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## b. Penelitian Lapangan

Lokasi merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini kami lakukan di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Karena di desa Pandak sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dan banyak masyarakat yang tinggal di gunung berdekatan dengan Kabupaten lain yaitu Kabupaten Pacitan.

Dan apakah dalam pembagian bantuan sosial PKH ini sesuai tepat sasaran dengan keterbatasan wilayah yang sangat luas. Dengan lokasi penelitian di sana sangat relevan jika dikaji dengan efektivitas penggunaan dana atau bahkan dengan tepat sarannya.

## c. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah

Penerima Manfaat program keluarga harapan (PKH).

### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun informan lain yaitu Kepala desa Pandak, Perangkat Desa dan Pembimbing Proram Bantuan Sosial PKH.<sup>16</sup>

d. Teknik Pengumpulan Data

- Dalam memecahkan suatu permasalahan secara tuntas dan jelas diperlukan data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam pengumpulan data-datanya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- Observasi

Sutrisno mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Menurut Sugiyono Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi

---

<sup>16</sup> "Yunita Palupi, Prasurvey, Desa Pulung Kencana Tanggal 5 November 2021 pukul 14.15 WIB.",

berperanserta (Participant observation) dan observasi non partisipan. Observasi berperan serta (participant observation) merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati yang menjadi sumber penelitian. Sedangkan penelitian non partisipan merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang menjadi sumber data melainkan hanya sebagai pengamat independent.<sup>17</sup>

- Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh data. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Untuk memperlancar memperoleh data, penelitian ini menggunakan metode tatap muka (face to face) dengan informan.

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan dengan tujuan memperoleh data yang sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Op.cit,199.

penelitian.

Skala Likert adalah skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Adapun peneliti menggunakan likert dalam bentuk checklist.

- Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Diharapkan mampu memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait dengan efektivitas program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

- e. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data yaitu dengan menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.

Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti.

Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

b) Rekomendasi data (reconstructing), yaitu menyusun data secara teratur dan berulang, sehingga mudah dipahami.

Sistematisasi data (system atizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematisa bahasan berdasarkan urutan masalah.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit serta menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada dasarnya proses analisis data itu di mulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya.

Metode pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Dalam penelitian ini data yang telah didapat peneliti kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pihak bagian sosial maupun pendamping PKH Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini peran PKH sebagai program bantuan bersyarat dalam pengentasan kemiskinan dianalisis dengan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### G. Sistem atika Pembahasan

Sistem atika pembahasan ini memiliki tujuan agar penyusunan skripsi dapat sesuai dengan bidang kajian. Dan untuk mempermudah pembahasan, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, disetiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai pembahasan yang utuh, berikut sistem atika penulisan dalam penelitian ini:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi menjelaskan tentang kerangka dasar penelitian yang berisi mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang di

dalam nya terdapat pem batasan serta perum usan masalah, tujuan penelitian, m anfaat penelitian, dan sistem atika penulisan.

## BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat pengertian-pengertian, dan sifat-sifat yang diperlukan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Penelitian terdahulu memuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berfikir menjelaskan alur logika kaitan antar variabel dimana dalam penelitian kuantitatif berupa data, grafik, diagram. Serta hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan kebenarannya.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan berbagai paparan data yang di dapat di lapangan. Seperti gambaran umum pada penelitian, dan analisis efektivitas program bantuan sosial PKH di Desa Pandak, Efektivitas pencapaian tujuan



dan adanya hambatan pada program bantuan PKH. Hasil penelitian yang didalamnya berisi deskripsi atau gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sesuai rumusan masalah yang dibuat.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Kesimpulan ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, dalam penutup juga harus ditulis keterbatasan penelitian dan rekomendasi atau saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan penelitian lebih lanjut.



## BAB II

### PENGERTIAN EFEKTIVITAS DAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL

#### PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN)

##### A. Pengertian Efektifitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik”, Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dalam kamus terbaru ekonomi & bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.<sup>18</sup>

Efektivitas adalah pemanfaatan potensi yang dimiliki, berdasarkan sarana dan prasarana dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa yang dijalankan.<sup>19</sup>

Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat berdasarkan kemampuan yang dimiliki.<sup>20</sup>

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>1</sup> *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis* (Surabaya : Gita Media Press..., 2015, t.t.), 212

<sup>2</sup> *Erlangga. Efektivitas organisasi (Kaidah perilaku)*

<sup>20</sup> “Damanuri, Aji. Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Majlis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, 2012,”

Menurut Aam Komaryah Cepi Triatna, mendefinisikan efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai.<sup>21</sup>

Efektivitas sendiri memiliki beberapa tujuan yang akan menjadi tolak ukur dalam suatu kegiatan:

- a) Agar seseorang dapat menghasilkan tujuan dengan baik
  - b) Membeikan gambaran kepada seseorang dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan suatu pekerjaan.
- Efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:
- c) Efektivitas individu berdasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
  - d) Efektivitas kelompok jumlah kontribusi dari semua anggota
  - e) Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok sehingga didapatkan hasil tiap-tiap bagianya<sup>22</sup>

Indikator-indikator dalam efektivitas:

- 1) Kejelasan tujuan hendak dicapai, hal ini ditunjukkan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi mencapai tujuan, merupakan penentuan cara, jalan

<sup>4</sup> "Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 2.,".

<sup>5</sup> "Sadono, Sukirno. Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan. Jakarta Prenada Media Group, 2006,".

atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti menentukan wawasan waktu, dampak dan pemutusan upaya.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembati tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan berkurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan suatu program agar berjalan dan efektif.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak dapat mencapai tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan

untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dan tercapai.<sup>23</sup>

Kriteria dalam efektivitas sendiri sebagai berikut:

- 1) Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- 2) Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi
- 3) Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- 4) Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.
- 5) Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian

<sup>23</sup> "Faruq Ahmad Futaqi, Liana Dewi Susanti<sup>2</sup>, Husna Ni'matu'l Ulya, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo<sup>1,3</sup>, Institut Agama Islam Negeri Metro<sup>2</sup> Korespondensi: Efektivitas Peran Bank Ziska: Ancaman Bagi Bank Thithil?, 2022,".

<sup>24</sup> Uha, Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2022,

kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>25</sup>

Menurut Carpenter, mengemukakan prinsip umum menilai efektivitas sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas adalah berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses input untuk menjadi output. Tujuan atau output harus tepat dengan kriteria.
2. Sistem yang dibandingkan harus sama, kecuali alat pemrosesnya. Misalnya yang harus sama atau homogen adalah tingkat pendidikan, kemampuan anak, sosial ekonomi, dan sebagainya.
3. Mempertimbangkan semua output utama.
4. Korelasi diharapkan bersifat kausalitas. Yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus kausalitas.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dengan sebaik-baiknya secara tepat. Dengan demikian sesuatu program dikatakan efektivitas apabila suatu program yang

<sup>25</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

<sup>26</sup> "M ade Pidarta, *Landasan Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 258.,"

dijalankan sudah memanfaatkan segala potensi yang ada dan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan serta menghasilkan hasil yang berkualitas.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers mengatakan mengenai Ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan

suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Dan dari integrasi berkaitan dengan perkembangan yang merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Dalam organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya.<sup>27</sup>

Menurut Budiani, menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program tepat dengan sasaran dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:

1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai mereka tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Tujuan program

Adanya tujuan program merupakan ukuran sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan

---

<sup>27</sup> “Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 107.,”.



program yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 4) Pemantauan program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.<sup>28</sup>

### B. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan. Tujuan dilaksanakannya PKH secara khusus adalah untuk meningkatkan status ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM, serta Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak KPM.<sup>29</sup>

Menurut buku Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

“Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial

<sup>28</sup> “Ni W ayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna ‘Eka Taruna Bhakti’ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Jurnal Ekonomi dan Sosial, V ol.2, No. 1, 53-54.,”.

<sup>29</sup> “Faudy, Himawan. 2017. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan M asyarakat di K abupaten B rebes. Tesis. Universitas Indonesia.,”.

bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial langsung yang ditujukan kepada keluarga miskin. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut analisis ekonomi, pelaksanaan PKH merupakan upaya pengurangan beban rumah tangga akan pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat miskin sendiri kesulitan untuk memenuhi kebutuhan non pangan, seperti pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, listrik, sewa rumah, dan sebagainya yang dianggap terlalu tinggi dan membebani biaya rumah tangga miskin. Maka dari itu perlunya peningkatan pendapatan serta pengurangan beban pengeluaran akan sangat membantu masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Secara mikro, kondisi tersebut dijabarkan dalam Hukum Engel yang menyatakan bahwa makin tinggi penghasilan suatu keluarga.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan / atau seseorang miskin rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan ditetapkan sebagai penerima manfaat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> "(<https://pkh.kemensos.go.id>) pada pukul 21<sup>05</sup> tanggal 16 Januari 2023.,".

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidakmampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial. Jaminan Kesejahteraan Sosial telah menjadi komitmen nasional yang diamanatkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam paradigma Islam pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, Pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan sosial.<sup>31</sup>

Dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kezoliman dan arogansi. Sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan

---

<sup>31</sup> "Diana, R. Idho. Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Kailau)," ,35.

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur). Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.<sup>32</sup>

#### C. Tujuan utama dari PKH

Tujuan Utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGS). Tujuan lain dari PKH secara khusus maupun secara umum. Berikut tujuan khusus PKH, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM /KSM
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM /KSM

<sup>32</sup> "Kajian Program Keluarga Harapan , Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2019, 6-7.

3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM /KSM .

PKH memiliki dasar hukum yang kuat dengan undang-undang :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 5) PM K No. 228/PM K.05/2016 tentang Perubahan Atas PM K No. 254/PM K.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- 6) Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- 7) Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
- 8) SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
- 9) Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan

Mandiri).<sup>33</sup>

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut beberapa aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban ini harus di penuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Komponen Kesehatan

- a) Anak usia 0-6 tahun: anak 0-28 hari harus di periksa kesehatannya..
- b) Anak usia 0-11 bulan harus di im unisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan di tim bang berat badan secara rutin setiap bulan sebanyak 3 kali.
- c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan february dan agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan im unisasi tambahan dan tim pang berat badan rutin setiap bulannya.
- d) Anak usia 5-6 tahun ditim bang berat badanya secara rutin untuk pantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD apabila lokasi atau posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD).

Ibu hamil dan ibu nifas seperti:

- a) Selama kehamilan, ibu hamil harus memeriksakan kehamilan kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan

<sup>33</sup> "Peraturan menteri sosial RI. No.1 tahun 2018 tentang keluarga harapan..".

0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen.

b) Ibu melahirkan harus di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau di periksa kesehatan dan mendapatkan pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, IV dan VI.

## 2) Komponen Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- a. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun, anak peserta PKH tersebut harus di daftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SM P/MTS terbuka).
- c. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun pendidikan kesetaraan.
- d. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk

mengikuti pendidikan belajar keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) terdekat.

- e. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan program pengurangan pekerja anak.
- f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang sangat lama, data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial anak.

3) Lansia 70 tahun keatas:

- a) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja atau mengurangi pukesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- b) Mengikuti kegiatan sosial (day care).

4) Penyandang disabilitas berat :

- a) Pemilihan kesehatan sesuai kebutuhan.
- b) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (home care).

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan



memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- b) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- c) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaris dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- d) Bagi lansia yang sudah di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat dapat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

#### D. Hak dan Kewajiban KPM PKH

PKH memiliki beberapa Hak dan kewajiban sebagai KPM PKH sebagai berikut:

- a) Bantuan sosial PKH.
- b) Pendampingan Sosial PKH
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>34</sup>

#### E. Mekanisme Program Bantuan Sosial PKH

---

<sup>34</sup> "Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, h, 6-7."

Penyaluran bantuan sosial PKH ini memiliki mekanisme atau tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat. Lokasi dan jumlah calon keluarga penerima manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

b. Penentuan calon penerima KPM PKH

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon keluarga penerima manfaat menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Dalam penetapan sasaran ada beberapa hal:

a) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.

- 1) Skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga yang terkena dampak bencana.

b) Usulan daerah, daerah membuat usulan yang memuat hal-hal sebagai

berikut:

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung program PKH.
- 2) Penyediaan fasilitas sekretariat pelaksana PKH Kab/kota.
- 3) Penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH di kecamatan.
- 4) Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II minimal 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

c. Penyiapan data awal validasi

Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat surat keputusan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan sebagai data calon peserta yang akan di validasi oleh pelaksana PKH di daerah.

Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan sumber data, sebagai berikut:

1. Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat terpencil sesuai dengan Peraturan Sosial RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Dalam hal pemerintah daerah memiliki data baru sebagai data usulan daerah, maka dapat diusulkan kepada Kementerian Sosial dengan mekanisme tersendiri.

d. Validasi data calon penerima manfaat PKH

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (eligible). Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses persiapan dan pertemuan awal dan validasi

a) Data awal calon KPM PKH

b) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan pertemuan awal sebagai berikut:

a. Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat

b. Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor terkait lainnya

c. Membagikan surat undangan pertemuan awal kepada calon KPM PKH sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum

c) Pelaksanaan Pertemuan Awal (PA)

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu

disampaikan oleh pendamping sosial PKH yaitu:

a. Menginformasikan tujuan PKH

- b. Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
- c. Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
- d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
- e. Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH
- f. Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH
- g. Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas kesehatan
- h. Penjelasan komitmen pendidikan
- i. Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia mulai 60 tahun ke atas.
- j. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi
- k. Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH komitmen yang ditetapkan dalam program dan

#### d. Pelaksanaan Validasi

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi rumah

calon KPM PKH. Calon KPM PKH mendatangi komitmen pada formulir validasi.

Kegiatan validasi dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.

e. Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank

Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal know your customer (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif.

f. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan:

- a) Hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan rekening bank; dan/atau
- b) Hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI

g. Penyaluran Bantuan sosial PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan (eligible), memenuhi kewajiban

berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai bantuan ditetapkan melalui surat keputusan kuasa pengguna anggaran direktorat jaminan sosial keluarga
- b) Bantuan sosial PKH terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen
- c) Bantuan tetap adalah bantuan stimun yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat
- d) Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga penerima manfaat PKH yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan/ atau komponen kesejahteraan sosial
- e) Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga
- f) Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- g) Transfer dana dari kas negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme non tunai.
- h. Pendampingan PKH

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku

KPM PKH.

Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a. Pendamping sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampingannya setiap bulan
- b. Pendamping sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran
- c. Pendamping komponen lansia dilaksanakan oleh pendamping sosial yang ditunjuk oleh direktorat rehabilitasi sosial lanjut usia
- d. Pendamping penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh pendamping sosial yang ditunjuk oleh direktorat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH dapat membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah dampingannya. Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH.

- i. Peningkatan kemampuan keluarga

Dalam rangka perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan



disabilitas.

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau yang dikenal family development session (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH.

Materi P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh pendamping sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampingannya.



### BAB III

## EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN , KUALITAS SERTA KUANTITAS DAN DAMPAK PENGHAMBAT PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1) Letak Geografis Desa Pandak

Desa Pandak adalah desa dengan nomor 2 terluas di Kecamatan Balong. Dengan letak geografis cenderung dataran tinggi. Desa Pandak salah satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Balong yang terletak kurang lebih 10 km kearah Barat dari Kecamatan Balong, Desa Pandak mempunyai wilayah seluas : 680.185 Ha dengan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Pandak

Sebelah Timur : Desa Bulu Kidul

Sebelah Selatan : Desa janti- Ngilo-ilo

Sebelah Barat : Desa Tahunan Lama Kab.Pacitan

Desa Pandak memiliki 4 Dukuh dengan wilayah yang luas. Seperti Dukuh Krajan, Dukuh Kates, Dukuh Kresek dan Dukuh Gundi. Iklim Desa Pandak sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan.

#### 2) Kondisi Sosial Desa Pandak

Masyarakat di Desa Pandak 99% menganut agama islam dengan

1% nya menganut agama Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengutamakan bergotong-royong dalam melaksanakan setiap kegiatan baik untuk kepentingan umum bahkan kepentingan pribadi seperti hajatan walimah.

### 3) Keadaan Ekonomi

Di Desa Pandak mayoritas masyarakat memiliki mata pencarian pertanian dengan memanfaatkan lahan mereka untuk menanam padi dan palawija.

Berikut data mata pencairan di Desa Pandak:

NO	NAMA	JUMLAH
1	PETANI/PEKEBUN	1234
2	WIRASWASTA	634
3	PELAJAR/MAHASISWA	564
4	KARYAWAN SWASTA	562
5	BELUM/TIDAK BEKERJA	447
6	MENGURUS RUMAH TANGGA	207
7	LAINNYA	45
8	BURUH TANI/PERKEBUNAN	20
9	PERDAGANGAN	15
10	BURUH HARIAN LEPAS	10
11	GURU	8
12	PEGAWAI NEGERI SIPIL	7
13	KEPOLISIAN RI	6

14	PEDAGANG	6
15	PERANGKAT DESA	5
16	PENSIUNAN	5
17	BIDAN	1
18	KEPALA DESA	1
19	WARTAWAN	1
20	PENATA RIAS	1
21	PERAWAT	1
22	SOPIR	1

Sumber data : E-suka Desa Pandak

#### 4) Perumahan

Desa pandak yang memiliki wilayah yang sangat luas ke 2 di kecamatan Balong memiliki rumah dengan status pribadi.

#### 5) Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo dipengaruhi dengan adanya saran dan prasarana penunjang pendidikan. Untuk melihat Komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TOTAL
1	Tamat SD/Sederajat	1431
2	SLTP/Sederajat	829

3	Tidak/Belum Sekolah	668
4	SLTA/Sederajat	546
5	Belum Tamat SD/Sederajat	249
6	Diploma IV/Strata I	42
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	13
8	Strata II	0

Sumber data: E-Suka desa Pandak

#### 6) Kondisi Penduduk

Data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo menurut BPS yaitu sebesar 3781 jiwa. Dengan kriteria jenis kelamin:

NO	JENIS KELAMIN	TOTAL
1	Pria	1878
2	Wanita	1903
3	Total	3781

Sumber data: E-Suka Desa Pandak

#### 7) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pandak

1. Kepala Desa : Sirnan, S.E
2. Sekretaris Desa : Sudiro
3. Bendahara Desa : Yatmono
4. Kamituwo Dusun Krajan : Sanggar
5. Kamituwo Dusun Kresek : Yatmono
6. Kamituwo Dusun Gundi : Sudiro

7. Kamituwo Dukuh Kates : Paeran
8. Kasi Keuangan : Anik Y
9. Kaur Pemerintahan : Subari
10. Kaur Kesejahteraan : Hadi Subroto<sup>1</sup>

#### B. Efektifitas Pencapaian Tujuan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes), fasilitas layanan pendidikan (fasdik), penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI.<sup>2</sup>

**IAIN**  
**PONOROGO**

Data Penerima KPM PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong

<sup>1</sup> "PK Sirnan, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023,".

<sup>2</sup> "Sosial RI, Pedoman, 9.," .

## Kabupaten Ponorogo.

NO	NAMA	ALAMAT
1	PARMI	DKH KATES RT 03 RW 02
2	YAUDI	DKH KATES RT 01 RW 02
3	MARITUN	DKH KATES RT 01 RW 02
4	BINTI MASRUOH	DKH KATES RT 01 RW 02
5	SAYUDI	DKH KATES RT 02 RW 02
6	YANI	DKH KATES RT 02 RW 02
7	HENY DWIANITAS	DKH KATES RT 03 RW 02
8	KEMIN	DKH KATES RT 03 RW 02
9	SITI AMINAH	DKH KATES RT 03 RW 02
10	SUGIARTI	DKH KATES RT 03 RW 02
11	SULAMI	DKH KATES RT 04 RW 02
12	SUMARSIH	DKH KATES RT 03 RW 02
13	SOIRAH	DKH KATES RT 05 RW 02
14	KATEMI	DKH KATES RT 05 RW 02
15	PARMI	DKH KATES RT 04 RW 02
16	YAINEM	DKH KATES RT 04 RW 02
17	YAIJEM	DKH KATES RT 04 RW 02
18	NYONI	DKH KATES RT 03 RW 02
19	SITUN	DKH KATES RT 02 RW 02
20	WARNI	DKH KATES RT 04 RW 02

21	L A S M I	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 2
22	T U M I N I	D K H K A T E S R T 0 4 R W 0 2
23	S A M I K E N	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 2
24	K E N Y A H	D K H K A T E S R T 0 4 R W 0 2
25	S I P O N	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 2
26	T U K I M A H	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 2
27	M A R I Y E M	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 2
28	M A I N E M	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 2
29	M I R A H	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 2
30	M I S I R A H	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 2
31	D A I N E M	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 2
32	B O N I Y E M	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 2
33	B A N I	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 2
34	T O I N I	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 2
35	M A N I R A H	D K H K A T E S R T 0 4 R W 0 2
36	S R I N I	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 2
37	K A T I J E M	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 2
38	M A N I Y E M	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 2
39	D A I T U N	D K H K A T E S R T 0 4 R W 0 2
40	S A I K E M	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 2
41	T U M I J E M	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 2
42	S U P R I Y A D I	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 2



43	W A G I Y E M	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 1
44	S A T U N	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 1
45	S R I J E M I N I	D K H K A T E S R T 0 4 R W 0 1
46	S I P A N	D K H K A T E S R T 0 5 R W 0 1
47	M A R I Y E M	D K H K A T E S R T 0 4 R W 0 1
48	Y A T M I	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 1
49	S A I N A H	D K H K A T E S R T 0 1 R W 0 1
50	S R I M U S R I	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
51	T U M I N E M	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
52	S I M I S	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
53	W A R S I Y E M	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
54	M I S K A N	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
55	S U R Y A N I	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
56	S E P I	D K H K A T E S R T 0 2 R W 0 1
57	T U M I N E M	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
58	S I T I M U N A W A R O H	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
59	K A T I Y E M	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
60	K A R T I N	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
61	M E S I Y E M	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
62	K A T I M A H	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
63	M I S M A N	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1
64	S A I T U N	D K H K A T E S R T 0 3 R W 0 1

65	SUNARYANTO	DKH KATES RT 04 RW 01
66	NILA WATI	DKH KATSE RT 04 RW 01
67	JARWATI	DKH KATES RT 04 RW 01
68	KATEMI	DKH KATES RT 04 RW 01
69	JARMINI	DKH KATES RT 04 RW 01
70	SULASTRI	DKH KATES RT 05 RW 01
71	SRINIMASRIPAH	DKH KATES RT 05 RW 01
72	DEWISUSANTI	DKH KATES RT 05 RW 01
73	KATEMI	DKH KATES RT 01 RW 01
74	PAILAH	DKH KATES RT 04 RW 01
75	KATINEM	DKH KATES RT 04 RW 01
76	KATIMAH	DKH KATES RT 01 RW 01
77	WARTININGSIH	DKH KATES RT 02 RW 01
78	KATEMI	DKH KATES RT 01 RW 01
79	MAINEM	DKH KATES RT 01 RW 01
80	SITUM	DKH KATES RT 01 RW 01
81	PARIJO	DKH KATES RT 02 RW 01
82	KATEMI	DKH KATES RT 04 RW 01
83	DAMIYO	DKH KATES RT 04 RW 01
84	WAGIYEM	DKH KRESEK RT 02 RW 01
85	LAMINEM	DKH KRESEK RT 03 RW 02
86	MESINEM	DKH KRAJAN RT 02 RW 01

87	JANEM	DKH KATES RT 02 RW 02
88	SOERAH	DKH KATES RT 04 RW 01
89	KATIMAH	DKH KATES RT 05 RW 01
90	MANIYEM	DKH KATES RT 05 RW 02
91	KATEMI	DKH KATES RT 04 RW 02
92	JARMI	DKH KATES RT 01 RW 01
93	PAERAH	DKH KATES RT 03 RW 01
94	SOINEM	DKH KATES RT 01 RW 02
95	YAUMI	DKH GUNDI RT 02 RW 01
96	GINEM	DKH GUNDI RT 02 RW 01
97	DAMIRAH	DKH KATES RT 02 RW 02
98	AMINAH	DKH KRAJAN RT 01 RW 01
99	PAIJEM	DKH KRESEK RT 04 RW 01
100	KATINAH	DKH KATES RT 04 RW 02
101	YATINEM	DKH GUNDI RT 01 RW 01
102	KATIRAH	DKH KATES RT 02 RW 01
103	SATI	DKH KRAJAN RT 03 RW 01
104	SINEM	DKH KRESEK RT 01 RW 01
105	PAINEM	DKH KRESEK RT 02 RW 01
106	RINA SURYANI	DKH KATES RT 05 RW 02
107	KHUMAIDAH	DKH KATES RT 05 RW 01
108	SRIWAHYUNI	DKH KATES RT 04 RW 01

109	DAMIRAH	DKH KATES RT 01 RW 01
110	SUDARMI	DKH KRESEK RT 01 RW 01
111	NIKEN PUSPITA DEWI	DKH KRAJAN RT 03 RW 02
112	SRI WAHYUNI	DKH GUNDI RT 03 RW 01
113	ANTI	DKH KRAJAN RT 01 RW 02
114	SARIJAH	DKH KRAJAN RT 03 RW 01
115	DWISUTARTI	DKH KATES RT 01 RW 01
116	KARNI	DKH KATES RT 03 RW 02
117	SITIJAINAB	DKH KRAJAN RT 03 RW 02
118	ANDIK EKO NUR CAGYONO	DKH KRESEK RT 03 RW 01
119	SRIHARYUTIK	DKH KRAJAN RT 01 RW 02
120	SARENGAT	DKH KATES RT 04 RW 01
121	SUPARTIN	DKH KATES RT 04 RW 02
122	HENIKHUSNUL KOTIMAH	DKH KRAJAN RT 03 RW 02
123	MURYATI	DKH KATES RT 02 RW 02
124	TUMINI	DKH KRAJAN RT 02 RW 02
125	NYATUN	DKH KRAJAN RT 02 RW 02
126	NURLAILATUL MUKAROMAH	DKH KATES RT 04 RW 01
127	PAINEM	DKH KATES RT 03 RW 01
128	KASIYEM	DKH KATES RT 05 RW 01
129	DAINEM	DKH KATES RT 04 RW 01
130	MARIYEM	DKH KATES 01 RW RW 02

131	SURAMI	DKH KRAJAN RT 03 RW 02
132	DWI ENDAH ERNAWATI	DKH KRAJAN RT 01 RW 01

Sumber data : Pendamping masing”pos di KPM di Desa Pandak

Adapun terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ialah sebagai berikut:

a. Validasi Data dan Calon Penerima KPM PKH

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal.

Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (eligible).

Sebagaimana berikut yang disampaikan Faruq selaku pendamping sosial PKH Desa Pandak:

“Jadi setelah adanya surat keputusan mengenai penetapan calon KPM PKH maka data awal calon KPM PKH itu dikirimkan ke kami selaku pendamping PKH biasanya melalui aplikasi e-PKH karena sekarang sudah berbasis aplikasi nah selanjutnya nanti dilaksanakan validasi, untuk pelaksanaan validasinya itu berbarengan dengan adanya pertemuan awal Calon KPM PKH yang sudah

ditetapkan tadi di data awal, sebelum melakukan kegiatan tersebut kami pendamping PKH akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan camat/pemerintah desa di Desa Pandak untuk menentukan lokasi serta membagikan surat undangan pertemuan awal kepada calon KPM PKH dan surat undangan itu juga di tujukan kepada unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya yang mendukung pelaksanaan program PKH nantinya.”<sup>3</sup>

Peneliti juga mewancarai Kepala Desa Pandak sebagaimana pernyataan berikut:

“Kalau di tinjau selama ini KPM PKH sendiri masih ada sebagian yang validasinya masih belum tepat sasaran mbak, Karena data yang dulu masuk sampai sekarang belum ada pengecekan ke lapangan untuk melihat ekonomi masyarakat yang sekarang masih mengacu pengajuan KPM PKH yang lama. Tapi untuk tahun ini ada data yang masuk untuk KPM PKH yang baru dari DINSOS dan itu yang mengajukan data kami perangkat desa pun tidak ada keterlibatannya. Jadi kami sendiri tidak bisa mengajukan bantuan untuk masyarakat yang benar-membutuhkan PKH sendiri mbak. Dalam pertemuan rutin PKH atau pembagian bantuannya kami tidak tau menahu hanya pendamping PKH yang ikut membantu masyarakat yang menjadi KPM PKH sendiri”.

**lain**  
**PONOROGO**

<sup>2</sup> “Pak Faruq, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023,” .

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Kartini selaku ketua kelompok 5 di dusun Kates sebagaimana pernyataannya:

“Saya sudah menjadi anggota PKH 2016 sampai sekarang, saya memiliki anak cewek yang sudah lulus SM S dan adiknya yang satu kelas 2 SMP dengan keterbatasan tubuh (cacat tubuh bibir sumbing), saya taunya dapat bantuan PKH ini dengan di berikan undangan dari DINSOS untuk mengambil kartu di Desa Ngendut bareng dengan penerima yang lainnya dengan membawa Foto copy KTP dan KK serta bertanda tangan materai untuk penerima PKH dengan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai anggota PKH”.<sup>4</sup>

Peeliti juga mewancarai ketua kelompok 2 di Dusun Krajan sebagaimana pernyataannya:

“Saya masih baru menjadi anggota KPM PKH pada tahun 2017, saya memiliki 3 orang anak yang 2 sudah lulus SMA dan yang satu masih kelas 4 SD dan sayng menjadi anggota PKH karena dengan komponen disabilitas karena suami saya yang memiliki kekurangan atau cacat pada fisiknya karena dulu waktu muda jatuh dari pohon kelapa dan tulang ekornya mengalami pergeseran tapi sudah melakukan berbagai operasi dan Alhamdulillah masih di beri kesempatan hidup mbak walaupun dengan keadaan yang sekarang ini”<sup>5</sup>

Dari pernyataan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada pertemuan awal pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi, adapun

<sup>3</sup> “Ibu Kartini, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023,” .

<sup>4</sup> “Ibu Khumaidah, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023,” .

proses persiapan pertemuan awal, pendamping PKH menentukan lokasi pertemuan awal dengan berkoordinasi dengan camat/kepala desa. Membagikan undangan pertemuan awal kepada calon KPM PKH dengan berkoordinasi dengan kepala dusun maupun ketua RT dan RW setempat dan hal-hal yang disampaikan pendamping pada pertemuan awal yaitu: menjelaskan tujuan PKH, menjelaskan syarat menjadi peserta PKH, menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program, menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH, menjelaskan mengenai penyaluran bantuan PKH. Tujuan adanya pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki pemahaman dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH

b. Penetapan KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen atau pemutakhiran data. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Sebagaimana berdasarkan penjelasan Faruq selaku pendamping PKH Desa Pandak :

“Kegiatan validasi data calon penerima PKH akan menjadi dasar dalam menetapkan KPM Desa Pandak, pastinya kegiatan validasi data ini harus dilaksanakan dengan sangat baik karena berkenaan dengan ketepatan sasaran penerima nya, pokoknya yang ditetapkan sebagai KPM yang mencakup dua hal, pertama benar-benar dari kalangan keluarga miskin, kedua memiliki komponen



kepesertaan yang itu semua dibuktikan dengan dokumen pendukung dalam proses validasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas mengenai penetapan keluarga penerima manfaat PKH dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan KPM PKH melihat dari hasil validasi data calon penerima dan juga hasil verifikasi komitmen, bila keluarga calon peserta PKH disebut eligible (memenuhi syarat) yaitu jika memenuhi dua kondisi yakni dari keluarga miskin dan terdapat anggota keluarga yang sesuai kategori kepesertaan PKH maka dapat ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Adapun untuk penetapan KPM PKH dilakukan melalui keputusan direktur jaminan sosial keluarga kementerian sosial RI.

#### c. Penyaluran

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki komponen kepesertaan, memenuhi kewajiban berdasarkan komponen yang dimiliki dan memiliki pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan setiap bulan. Sebagaimana penjelasan Bapak Faruq selaku pendamping PKH Desa Pandak dalam wawancara dengan peneliti, sebagai berikut:

“Untuk penyaluran bantuan itu sekarang secara nontunai beda dengan dulu awal pelaksanaannya disini tahun 2014 itu untuk pencairan ke kantor pos nanti di kasih secara cash, mulai tahun 2016 sampai sekarang itu sudah dilakukan secara nontunai disalurkan langsung ke rekening KPM PKH yang

---

<sup>5</sup> “Pak Faruq, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023.”

dapat diakses dengan kartu kombo yang besaran nominalnya itu sesuai komponen yang dimiliki maksimal 3 orang dalam satu keluarga bila memiliki semua komponen maka diambil 3 komponen terbesar. cair tidaknya melihat hasil verifikasi komitmen, nah sistem penyalurannya itu 3 bulan sekali 4 kali tahapan pencairan, penyaluran tahap pertama bulan Maret, bulan kedua Juni, nah sekarang sudah masuk tahap penyaluran ketiga yakni bulan September itu nanti melihat dari hasil bulan penilaian komitmen KPM untuk penyaluran tahap ketiga ketiga yaitu di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sudah entry data dan final closing nah seperti itu setiap bulan”.<sup>7</sup>

Pernyataan di atas didukung oleh Ibu Sri Wahyuni selaku ketua pos 3 di Dusun Kates, yang menerangkan sebagai berikut:

“Mekanismenya penyaluran bantuan sosial PKH sekarang kita sudah pakai ATM kombo nanti ketika waktu penyaluran kita akan konfirmasi ke ketua kelompok nah nanti ketua kelompok akan memberitahu ke anggota-anggotanya, untuk masalah besaran bantuannya itu kalo ibu hamil dapat 3 juta, balita usia 06 tahun 3 juta, anak SD 900 ribu, SMP 1.500 juta, SMA 2 juta, lansia 2.400 juta, disabilitas berat 2.400 juta, besar kecilnya bantuan tergantung pada komponen masing-masing KPM, selain itu mereka juga mendapatkan bantuan BPNT yaitu berupa beras 15 kg sama sembako biasanya.”<sup>8</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Katin selaku anggota KPM Dusun

<sup>7</sup> “Ibid .

<sup>8</sup> “Ibu Sri Wahyuni, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023,” t.t.

Kates, sebagai berikut:

“Saya baru mendapat bantuan PKH mulai tahun 2019 kemarin ini, kalo untuk pencairan bantuannya saya kurang tau betul gimana prosesnya pokoknya nanti nunggu kabar dari ketua kelompok trus kalo saya minta bantuan suruh ngambilkan mas, soalnya saya gk paham pakai ATM, kalo bantuan ya itu uang sama beras, telur itu dah mas, kalo beras itu nanti dibagikan di kantor desa”.<sup>9</sup>

Dari penjelasan beberapa informan di atas melalui wawancara dengan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Pandak pada awal pelaksanaan pada tahun 2014 bentuk penyaluran bantuan kepada KPM melalui kantor pos dengan bentuk penyaluran tunai kepada KPM PKH.

Pada tahun 2016 bentuk penyaluran dirubah dengan dilakukan secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dapat diakses melalui kartu kombo, adapun indeks dan komponen bantuan sosial PKH yang disalurkan kepada KPM berbeda-beda menyesuaikan dengan komponen yang dimiliki oleh setiap KPM PKH, sebagaimana tabel berikut:

No	Komponen	Jumlah
1	Kesehatan, meliputi:	
	Ibu hamil/menyusui	Rp.3.000.000

<sup>9</sup> “Ibu Katin, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023,” t.t.

	Anak usia 0-6 Tahun	Rp.3.000.000
2	Pendidikan, meliputi:	
	Anak sekolah SD/M I	Rp.900.000
	Anak sekolah SM P/M ts	Rp.1.500.000
	Anak sekolah SM A/M A	Rp.2.000.000
3	Kesejahteraan sosial, meliputi:	
	Lansia mulai umur 60 tahun	Rp 2.400.000
	Disabilitas berat	Rp.2.400.000

Sumber: Dokumentasi Pendamping PKH Desa Pandak

Pelaksanaan Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan bertahap setiap 3 bulan sekali dengan 4 kali tahap penyaluran. Penyaluran diberikan berdasarkan penetapan KPM yang memiliki komponen kepesertaan dan wajib memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen yang dimiliki KPM PKH serta mengikuti pertemuan kelompok setiap bulannya, dan semua itu dapat melihat dari hasil bulan penilaian komitmen KPM PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH.

Adapun disamping bantuan uang, keluarga penerima manfaat PKH juga mendapatkan bantuan komplementer seperti bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPNT merupakan skema baru pemberian beras

sejahtera bagi KPM PKH yang penyalurannya dikoordinir oleh pemerintah Desa setempat.

d. Pendampingan

Pendampingan bagi keluarga penerima manfaat PKH diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping PKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Seperti yang disampaikan Pak Faruq selaku pendamping PKH Desa Pandak, sebagai berikut:

“Pendamping PKH wajib melakukan pendampingan ke KPM PKH namanya saja sudah pendamping kan tujuannya apa? secara umum guna memastikan program PKH disini berjalan dengan baik dan hasilnya bisa maksimal sehingga berjalan sebagaimana yang telah di konsep sedemikian. Selain itu kami sebagai pendamping memiliki kewajiban untuk melaksanakan pertemuan kelompok minimal 1 bulan sekali, bantuan sudah diterima KPM apa belum sesuai tidak dengan yang sudah ditetapkan, memastikan KPM melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan komponennya, dan menangani bilamana ada kendala dalam pelaksanaan maupun penyaluran bantuan berdasarkan laporan KPM PKH ke kami.”<sup>10</sup>

e. Pertemuan Peningkatan (P2K2)

Hal yang sama juga disampaikan Dasri selaku KPM PKH, sebagai

<sup>8</sup> “Pak Faruq, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023.”

berikut:

“Dari pendamping ya biasanya mendampingi kalo ada kegiatan kayak pertemuan kelompok itu ngisi pembelajaran, kayak saya kan punya anak bayi kalo ketika ada posyandu juga hadir ngecek, kalo ada masalah kita lapor ya datang gitu dek, pokoknya kerjanya pendamping itu kalo menurut saya sudah bagus dek”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa guna percepatan pencapaian tujuan program keluarga harapan maka diperlukan pendampingan kepada KPM PKH oleh pendamping sosial PKH. Salah satu tujuan pendampingan untuk memastikan KPM PKH memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan kriteria komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM PKH.

Pendamping sosial PKH juga berkewajiban untuk melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH minimal satu bulan sekali, memastikan KPM dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta memastikan bantuan sudah tersalurkan kepada KPM PKH. Dalam pelaksanaan pendampingan maka pendamping PKH Desa Pandak membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah dampungannya untuk memudahkan proses pendampingan. Adapun kelompok KPM PKH Desa Pandak dibagi berdasarkan dusun yaitu Dusun Kates 1, Dusun Kates 2, Dusun Krajan, Dusun Gundi dan Dusun Kresek

---

<sup>9</sup> “Ibu Dasri, Wawancara, Ponorogo, 21 Maret 2023,”

yang masing-masing kelompok beranggotakan maksimal 30 KPM dan satu ketua kelompok.

C. Kualitas dan Kuantitas Program PKH Bagi Masyarakat di Desa Pandak

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah dari data terpadu penanganan program fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membentuk keluarga sejahtera di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Berikut merupakan hasil wawancara kepada Sirnan, S.E selaku Kepala Desa Pandak:

“Program PKH sendiri memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan sembako dan uang

dengan nominal yang besar. Dan dapat mensejahterakan masyarakat sendiri  
 mbak”.<sup>12</sup>

Adapun wawancara dengan pendamping PKH Bapak Faruq  
 menyampaikan:

“Program bantuan PKH mulai dilaksanakan di Desa Pandak mulai  
 tahun 2014, dari segi tujuannya sudah jelas PKH ini ingin meningkatkan  
 taraf hidup KPM melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan  
 sosial, mengurangi beban pengeluarannya dan meningkatkan pendapatan  
 keluarga miskin, kalo menurut pemantauan saya selama ini sebagai  
 pendamping dengan konsep program yang sangat bagus seperti ini, maka  
 saya katakan PKH ini sangat efektif dalam membentuk keluarga sejahtera,  
 karena bisa dilihat sendiri dari tingkat keberhasilan yang sudah dicapai oleh  
 program PKH salah satunya bisa dilihat KPM bisa terbantu dalam segi  
 kebutuhan dasar dalam keluarga dengan adanya PKH dan banyak manfaat  
 lain yang didapat dan itu semua sejalan dengan tujuan dari program PKH  
 ini, dan juga bisa dilihat dari jumlah KPM yang tergraduasi secara mandiri  
 di wilayah Pandak mencapai 350 orang realisasi tahun 2019 hal itu  
 menempatkan kita di posisi ketiga se kabupaten Ponorogo.

---

<sup>10</sup> “Pk Sirnan, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023,” .



Presentase ini menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dari PKH di Pandak dan ini menandakan bahwa program PKH bisa mensejahterakan masyarakat/ keluarga miskin”.<sup>13</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan Dwi S selaku bendahara kelompok 5 pos Dusun Kates menyempakan:

“Kalau dengan tujuan PKH sendiri selama saya menjadi anggota KPM alhamdulillah sedikit membantu adanya bantuan PKH, kalau dikatakan menjadi sejahtera masih kurang mbak. Tapi sedikit membantu kebutuhan sehari-hari dengan bantuan sembako kalau dengan uangnya bisa membantu untuk biaya keseharian membeli lauk pauk dan yang lainnya mbak”.<sup>14</sup>

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Ibu Jarwati selaku KPM PKH Dusun kates memiliki komponen pendidikan yang mengatakan:

“Saya dapat bantuan dari PKH mulai tahun 2016, iya saya bersyukur bisa dapat bantuan PKH bisa buat biaya sekolah anak saya, anak saya 2 laki-laki semua, yang pertama sudah tamat SMA, yang kedua SMK kelas 3, awal dulu sebelum dapat bantuan ya susah mas mau buat beli baju, buku, sepatunya anak-anak kok buat itu buat makan aja susah, apalagi saya seorang janda yang di tinggal mati suaminya saya bersyukur dapat bantuan PKH ini mas, jadi biaya anak-anak sekolah sudah gak berat, bisa

<sup>13</sup> “Pak Faruq, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023.”

<sup>14</sup> “Dewi S, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023,” .

punya tabungan juga buat sekolah anak-anak kalo bisa ya setinggi-tingginya jangan sampe kayak orang tuanya”.<sup>15</sup>

#### D. Hambatan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dari semua program pemerintah akan memiliki faktor penghambat dari bantuan tersebut yang bersal dari internal maupun external. Pada wawancara dengan ibu kartin sebagai berikut:

“faktor penghambat program bantuan sosial PKH selama ini pada waktu penerimaan yang kurang tepat mbak, ada yang menerima setiap bulan sekali ada yang 3 bulan sekali bahkan ada yang 1 sampai 2 tahun sekali baru menerima bantuan di rekening KPM PKH mbak. Dan adanya perbedaan ini dapat memicu kecemburuan sosial di masyarakat yang menerima PKH mbak”.<sup>16</sup>

Ada juga wawancara dengan ibu Khumaidah dengan penjelasan sebagai berikut:

“sebenarnya kalau hambatan itu terjadi karena beberapa faktor mbak, karena dari pendamping sendiri juga sudah melakukan pengecekan untuk KPM PKH yang lama tidak mendapatkan bantuan, dan masih ada hambatan bagi masyarakat miskin atau kekurangan yang belum mendapatkan bantuan PKH ini. Padahal keluarga miskin ini tidak memiliki

<sup>15</sup> “Jarwati, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023,” .

<sup>16</sup> “ibid :47,” .

fasilitas rumah yang bagus penghasilannya saja hanya bisa untuk  
menghidupi keseharian, kalau untuk pendidikan masih mengalami  
kesulitan”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan  
hambatan dari program bantuan sosial PKH sendiri lebih tepatnya pada  
waktu pendistribusian bantuan dan kurangnya validasi ulang pada penerima  
KPM PKH.



---

<sup>17</sup> "ibid: 48," t.t.

## BAB IV

### ANALISIS EFEKTIVITAS TUJUAN SASARAN, KUALITAS SERTA KUANTITAS DAN DAMPAK PENGHAMBAT PROGRAM BANTUAN SOSIAL PKH

#### A. Analisis pencapaian tujuan bantuan oleh peserta penerima program keluarga harapan (PKH) di Desa Pandak

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-baigiannya maupun penatahapan dalam arti periodisasinya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan didalam setiap programnya. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa target sasaran pada penerima PKH masih kurang tepat sasaran, serta pengelolaan dalam penggunaan indeks bantuan PKH masih belum maksimal digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan komplementernya. Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran. Dan dari proses pengelolaan indeks bantuan pada penerima PKH juga masih belum efektif. Sehingga jika diukur dari pencapaian tujuan yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum efektif. Seharusnya

agar Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan efektif, jika dalam target dan proses tercapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut adanya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ponorogo akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Analisis Kualitas dan Kuantitas program bantuan sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan integritas dalam program bantuan sosial PKH ditinjau dari:

##### 1. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak pra sekolah), komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dan kesejahteraan sosial.

Besaran bantuan Program Keluarga Harapan PKH pada setiap komponen berbeda-beda. Sesuai dengan data temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa sebagian dari peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandak tergolong masyarakat menengah kebawah akan tetapi masih ada sebagian peserta penerima manfaat sendiri yang belum tepat sasaran, sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan bantuan yang diterima belum

tepat sasaran. Banyak dari mereka yang tidak ada pemasukan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## 2. Tepat waktu

Penyaluran bantuan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan komponen kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil temuan data pada bab sebelumnya, bahwa pencairan PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dilakukan sudah tepat waktu. Proses pencairan bantuan sosial dilakukan per triwulan setiap tahunnya yang memiliki 4 tahap. Jadwal pencairan dana bantuan tidak ditentukan hari maupun tanggalnya. Pencairan dilakukan apabila dari pusat sudah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Proses pencairan dana tersebut dilakukan oleh pendamping PKH untuk melakukan pengkawalan kepada peserta agar tepat dana yang diterima, tepat jumlah dan tepat sasaran.

## 3. Tepat penggunaan

Pengalokasian dana bantuan oleh peserta penerima PKH yang ada di Desa Pandak bisa dikatakan sudah tepat penggunaan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun mereka menggunakan

dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi mereka tetap memprioritaskan dana tersebut sebagai mana mestinya. Hal ini bisa diperkuat dengan data rincian penggunaan dana bantuan PKH yang tercantum di lampiran tabel.

Tujuan diberikannya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan anaknya. Penggunaan dana bantuan oleh peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandak sudah menggunakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai peruntukannya yaitu dalam bidang pendidikan masyarakat menggunakan dana bantuan yang diterima untuk keperluan sekolah anaknya seperti pem bayaran SPP, pakaian sekolah, buku dan sepatu.

Dalam setiap program yang dilaksanakan, tentu ada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran ini sangat penting untuk ditentukan agar program tersebut bisa terus dievaluasi. Artinya, suatu program dikatakan berhasil apabila bantuan dan sasaran yang telah ditentukan tercapai secara maksimal.

Pengalokasian dana bantuan yang tepat dan benar apabila memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) cukup bermanfaat membantu peserta dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandak dapat dikatakan pengalokasian dana yang di terima oleh peserta penerima bantuan belum efektif melalui indikator tujuan dan manfaat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Karena penerima manfaat Program Keluarga belum tepat sasaran. Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat miskin.

Kesejahteraan merupakan rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar *universal* menyangkut sandang, pangan dan papan, serta kesehatan (kesejahteraan ekonomi dan sosial).<sup>18</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan primer dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak akan dikatakan sejahtera apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Demikian pula dalam sistem distribusi ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kesenjangan dan

---

<sup>1</sup> "Grada M aeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, (Jakarta, Narasi, 2019), 246,"



kemiskinan,serta menjamin perputaran roda perekonomian bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk tindakan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan adalah dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga miskin agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.Hal ini merupakan tujuan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Dari hasil temuan di lapangan Pengalokasian dana bantuan oleh peserta penerima bantuan PKH di Desa Pandak bisa dikatakan belum tepat penggunaan, sesuai dengan tujuan dari PKH itu sendiri. Seperti biaya pendidikan dan biay kesehatan. Meskipun masih ada sebagian dari mereka yang menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan belum ada keinginan bagi mereka untuk mengalokasikan dana bantuan tersebut untuk jangka panjang dan masyarakat masih memiliki sikap ketergantungan yang tinggi dengan adanya program bantuan sosial PKH ini. Seperti yang dilakukan oleh Inak Mulianah mengatakan bahwa 20% dana PKH dia gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli beras, gas dan lain, 80% dananya lagi dia gunakan untuk keperluan lainnya tidak sesuai dengan tujuan dari PKH tersebut.

Hal itu membuktikan bahwa dana PKH ini belum alokasikan

---

<sup>2</sup> “Irfan Syauqi Beiq dan Laili Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019), 2.,”

dengan baik oleh peserta penerima bantuan PKH yang ada di Desa Pandak.

Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya, peneliti menemukan sebagian besar masyarakat yang menjadi peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandak dikatakan belum mengalami perubahan dalam perekonomian. Dilihat dari tingkat pendidikan, perubahan pola konsumsi masyarakat, kondisi perumahan dan kondisi tingkat pendapatan keluarga belum mengalami perubahan ekonomi yang meningkat setelah adanya bantuan sosial tersebut. Saat ini tingkat pendidikan anak yang tidak sekolah masih tinggi namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

#### 4. Tepat Administrasi

Tepat administrasi adalah tepatnya administrasi secara tepat dan benar dalam pendistribusian PKH. Administrasi yang dilakukan di Desa Pandak adalah dengan cara Rumah Tangga Miskin membawa kartu ke tempat yang disediakan pemerintah yaitu E-warung maka masyarakat bisa menukarkan uang yang ada dalam bentuk barang yang berupa beras dan telur sesuai dengan harga yang ada di ATM penerima PKH. Dari hasil wawancara dengan KPM di Desa Pandak membuktikan bahwa administrasi yang telah terjadi di Desa Pandak masih kurang tepat karena masih terdapat masyarakat yang dikatakan mampu dalam penerimaan (PKH) tersebut dan ada dikatakan tidak mampu tidak menerima (PKH) Program Keluarga Harapan tersebut. Jadi dari indikator efektifitas dan hasil wawancara dari Penerima Manfaat PKH dapat penulis simpulkan dari keseluruhan indikator,

Efektifitas Program keluarga Harapan di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ada 4 indikator adalah tidak efektif dimana 3 dari 4 indikator yang ditetapkan tidak terpenuhi, 3 indikator yang tidak terpenuhi itu adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat waktu dan ada 1 indikator yang telah terpenuhi yaitu tepat administrasi jadi efektifitas program keluarga harapan (PKH) di Desa Pandak.

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo belum terlaksana secara efektif, belum efektifnya karena ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan penerima PKH, selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh anggota PKH menjadi tepat guna tidak sesuai dengan tujuan PKH itu sendiri.

#### C. Analisis Hambatan Pada Program Bantuan Sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam pelaksanaan suatu program tentu tidak menutup kemungkinan timbul suatu hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan hambatan tersebut bisa muncul saat program telah dilaksanakan, yang bisa dirasakan baik dari petugas maupun masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis akan mengulik hambatan-hambatan apa yang dirasakan dalam mengefektifkan program keluarga harapan di Desa Pandak. Apabila dicermati dari informasi yang didapatkan terkait dengan hambatan pelaksanaan program PKH di Desa Pandak maka terlihat bahwa ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping dan peserta PKH antara lain: banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH,

belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan yang sering tidak tepat waktu. Program Keluarga Harapan atau yang disebut PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberikan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin.

Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan aspek teori sebagaimana dikatakan oleh Sondang P. Siagian mengatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Kesesuaian antara teori dengan praktek terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pandak, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pandak jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan

verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.

Meskipun pelaksanaan program keluarga harapan sudah dilaksanakan oleh para pendamping di masing-masing Desa di Desa Pandak sendiri khususnya pada saat sosialisasi mengenai program tersebut berbarengan dengan pelaksanaan pertemuan awal dan validasi hal tersebut dirasa sangat kurang efektif untuk pemahaman masyarakat mengenai program keluarga harapan meskipun demikian pelaksanaan pertemuan kelompok di Desa Pandak rutin diadakan pada setiap satu bulan sekali.

Komitmen peserta program keluarga harapan dalam memanfaatkan komponen bantuan yang diperoleh seperti komponen pendidikan, komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial beberapa dari peserta yang diwawancarai oleh penulis cukup komitmen terhadap kehadiran peserta di fasilitas pendidikan karena para peserta mengetahui resiko ataupun sanksi yang diperoleh jika anak-anak mereka kehadiran di sekolah kurang dari 85% bantuan akan dipotong ataupun dipending sedangkan komitmen peserta di fasilitas pendidikan peserta program keluarga harapan pada waktu-waktu tertentu wajib mengunjungi posyandu atau fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa.

Di Desa Pandak untuk penerima bantuan pada komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas dan lansia diatas 70 tahun keatas terdapat satu peserta PKH yang masuk dalam kategori tersebut tetapi

berdasarkan informasi dari pendamping bantuan tersebut belum tersalurkan padahal komponen kesejahteraan sosial sudah berlangsung dari tahun 2016.

Bisa dikatakan bahwa Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa andak belum efektif karena melihat dari jumlah peserta Program Keluarga Harapan yang berjumlah 500 lebih Keluarga Penerima Manfaat masih belum komit terhadap fasilitas yang diberikan kepada peserta seperti fasilitas pendidikan peserta program keluarga harapan yang mempunyai anak usia sekolah lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA dan sasaran penerimaan bantuan yang belum merata untuk masyarakat Desa Pandak.

Dalam pelaksanaan suatu program tentu tidak menutup kemungkinan timbul suatu hambatan yang dihadapi dilapangan hambatan tersebut dapat muncul saat program telah dilaksanakan, yang bias dirasakan baik dari petugas maupun dari masyarakat yang bersangkutan.

## B A B V

### P E N U T U P

#### A . K e s i m p u l a n

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektifitas bantuan sosial PKH di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Efektifitas program keluarga harapan pada Desa Pandak secara keseluruhan berdasarkan rata-rata indikator 4T adalah tidak efektif dimana 3T dari 4T indikator yang ditetapkan tidak terpenuhi, 3T indikator yang tidak terpenuhi itu adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat waktu dan 1T indikator yang telah dipenuhi yaitu tepat administrasi. Efektifitas program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Pandak . PKH di Desa Pandak terlaksana dari tahun 2016-2022 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Pandak belum terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta PKH menjadi tidak tepat guna sesuai dengan tujuan PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Pandak.
2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Pandak, dapat dilihat dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Maka penulis berkesimpulan bahwa efektifitas

Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Pandak sudah dapat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat namun demikian PKH ini belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dilihat dari indikator perubahan nyata yang dialami masyarakat.

3. Hambatan yang dialami program keluarga harapan di Desa Pandak yaitu pada indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata sebagai berikut dimana belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya penerima bantuan yang memergunakan dana yang diterimanya diluar ketentuan yang dipersyaratkan misalnya dana yang diterimanya dibelanjakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan keperluan dapur lainnya karena alasan tertentu. Selain itu, jika dilihat dari hasil penelitian sebagian masyarakat mulai terus menerus mengharapakan bantuan dana PKH sehingga merubah pola pikir masyarakat kurang dalam menciptakan perilaku kemandirian sedangkan PKH diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Pada indikator perubahan nyata dari PKH belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan PKH karena belum bisa meningkatkan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan di Desa Pandak dalam pemenuhan jangka panjang. Namun dilain sisi PKH sudah dapat membantu mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan tujuan jangka pendek (konsumsi langsung).



## B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan saran sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian sebaiknya antara pemerintah daerah dan pusat melakukan kegiatan validasi awal besar-besaran dengan memberlakukan foto rumah akses transportasi dan penghasilan agar penerima PKH tepat sasaran, tepat tujuan dan tepat waktu yang sesuai dengan peraturan PKH yang ada.
2. Bagi penerima bantuan PKH hendaknya menggunakan dana yang diterima sebagaimana mestinya berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan juga kepada penerima bantuan untuk tidak hanya terus-menerus mengharapkan dana bantuan PKH sehingga memiliki pola pikir kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena PKH hanya merupakan bantuan dari pemerintah bukan gaji atau upah sehingga masyarakat bisa memaksimalkan lagi untuk lebih berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
3. Terkait dengan penggunaan bantuan dana PKH selain untuk kesehatan dan pendidikan, seharusnya keluarga penerima manfaat akan lebih baik lagi apabila dana yang diterimanya digunakan untuk hal-hal produktif misalnya membuka usaha kecil-kecilan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
- Al-Quran, An-Nisa', Ayat 135.
- "Aravik, H. 2016. Ekonomi Islam : Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi. Malang: Empat Dua." Aug 3, 2020
- "Damanuri, Aji. Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, 2012."
- "Dewi S, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023."
- "Diana, Ridho. ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)."
- "Dianti Ramadhan, 2016. Skripsi : Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerajinan Tangan Khas Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus). IAIN Raden Intan Lampung." 2017, adamedia Group, 2018), 107."
- "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo).". Erlangga. Efektivitas organisasi (Kaidah perilaku).
- "Faruq Ahmad Futaqi, Liana Dewi Susanti<sup>2</sup>, Husna Ni'matul Ulya, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo<sup>1,3</sup>, Institut Agama Islam Negeri Metro<sup>2</sup> Korespondensi: Efektivitas Peran Bank Ziska: Ancaman Bagi Bank Thithil?, 2022."
- "Faudy, Himawan. 2017. Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Brebes. Tesis. Universitas Indonesia."
- "Grada Maeswara, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono, (Jakarta, Narasi, 2009), 246."
- "Harry Hikmat, 2018. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Jakarta : Perlindungan dan Jaminan Sosial."
- "(<https://pkh.kemensos.go.id>) pada pukul 21<sup>05</sup> tanggal 16 Januari 2023."
- "ibid : 7."
- "ibid: 48."
- "Ibu Dasri, Wawancara, Ponorogo, 21 Maret 2023."
- "Ibu Kartini, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023."
- "Ibu Katin, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023."
- "Ibu Khumaidah, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023."
- "Ibu Sri Wahyuni, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023."
- "Irfan Syaqui Beiq dan Laili Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm .2."
- "Jarwati, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023."

- “Kajian Program Keluarga Harapan , Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, h, 6-7..”
- Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis. Surabaya : Gita Media Press., 2015,
- “Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.”
- “Khoirul Nts ‘Penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Tinggi Kota’..”
- “Kusumawati, Eny (2019) Analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perspektif ekonomi Islam : studi kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.” 20 May 2019 06:46,
- “Made Pidarta, Landasan Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 258..”
- Nahdatullah, Nurkhairiyah. “PEMBIMBING I: Drs. ARSA, M.HI PEMBIMBING II: KHAIRIYANI, SE., M.S.AK,”
- “Ni Wayan Budiani, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna ‘Eka Taruna Bhakti’ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol.2, No. 1, 53-54..”
- “Nurdiana ‘Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamas’.. (Skripsi Fakultas Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2017).”
- “Pak Faruq, Wawancara, Ponorogo, 20 Maret 2023.”
- “Peraturan menteri sosial RI. No.1 tahun 2018 tentang keluarga harapan..”
- “Pk Sirnan, Wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2023.”
- “Sadono, Sukirno. Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan. Jakarta Prenada Media Group, 2006,”
- Saleh, Drs H M. “JURUSAN : EKONOMI SYARIAH FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020 M,”
- “Sosial RI, Pedoman, 9..”
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Op., Cit, h. 199.
- “Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakaerta: Rajawali Pers, 2013), 2..”
- Sutjiatmi, Sri, dan Farida Um aroh. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.” Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan 2, no. 2 (23 April 2019).
- Uha, Ismail Nawawi, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2002,
- Wulandari, Felinda, Yamardi Yamardi, dan Titin Rohayatin. “EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG

KABUPATEN BANDUNG BARAT.” Jurnal Caraka Prabhu 4, no. 1 (1 Juni 2020)

“Yunita Palupi, Prasurvey, Desa Pulung Kencana Tanggal 5 November 2020 pukul 14.15 WIB.”

